



KR-Alwi Alaydrus

Pelantikan petugas Pilkada Pati 2024.

## MENUJU PILKADA PATI 2024

### Perburuan Rekomendasi Makin Ketat

**PATI (KR)** - Pasar taruhan di kalangan masyarakat terkait Pilkada Pati 2024 lebih menjagokan H Ali Budrudin SE (Ketua DPRD Pati) akan mendapat rekomendasi dari DPP PDIP untuk maju sebagai Calon Bupati Pati 2024-2029. Demikian diungkapkan tiga penggiat demokratisasi di Pati, yakni Fatkhurochman SH, H Solechan Arif, dan drs Pramudya Budi. Hal itu terungkap dalam wawancara dengan wartawan, Rabu (29/5).

Menurut Koordinator Presidium LSM Dewan Kota, Pramudya, Pilkada Pati 2024 akan menarik karena parpol di dewan kemungkinan memunculkan dua atau tiga pasangan calon bacabup/bacawabup. Selain itu, hingga saat ini belum mengkristal bacabup siapa akan menggandeng cawabup siapa. Kecuali balon Wahyu (Kades Gadingrejo) yang sudah deklarasi akan mengajak Suharyono (mantan Sekda) sebagai cawabup.

"Nama-nama yang sudah mendaftar di parpol, sekarang sedang berburu surat rekomendasi dari DPP Parpol masing-masing. Persaingan mendapatkan rekomendasi akan sangat ketat. Mereka terlihat sangat siap berlaga dalam kontestasi pemilihan bupati/wakil bupati Pati 2024," kata Lramudya.

Sementara itu, Fatkhurochman mengungkapkan, pasar taruhan di daerah Kayen, Trangkil dan Wedarijaksa menjagokan nama Ali Badrudin, Ketua DPC PDIP Pati yang juga Ketua DPRD Pati, sangat berpeluang mendapat rekomendasi dari DPP. "Ini karena penghargaan atas prestasi Ali Badrudin yang berhasil menambah kursi PDIP secara signifikan di DPRD Pati," ungkapnya.

Terpisah, Solechan Arif mencatat belum ada nama yang pasti bakal diusung dari parpol mana. "Pendaftar cabup bisa melirik cawabup atau bisa sebaliknya, katanya. (Cuk)-f

## PILKADA KARANGANYAR 2024

### Jumlah TPS Berkurang

**KARANGANYAR (KR)** - Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pilkada Karanganyar 2024 diperkirakan 1.529 titik yang tersebar di 177 desa/kelurahan di 17 kecamatan. Jumlahnya berkurang dibanding Pemilu Legislatif 2024, sebanyak 3.200 TPS.

Ketua KPU Karanganyar, Daryono mengatakan persebaran dan jumlah riil TPS masih dipetakan. Namun perkiraannya dibutuhkan 1.529 TPS untuk Pilkada nanti. "Jumlah pemilih Pemilu Legislatif 2024 dan Pilkada kurang lebih sama. Namun TPS berbeda. Maksimal setiap TPS 800 pemilih, sedangkan di pilkada nanti sekitar 600 pemilih setiap TPS," ungkapnya, Rabu (29/5).

Menurut Daryono, KPU Karanganyar sebelumnya telah melakukan rapat koordinasi dengan KPU RI terkait persiapan Pilkada Serentak 2024. Sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, jumlah pemilih di satu TPS maksimal 800 pemilih.

Meski jumlah TPS untuk Pilkada lebih sedikit dibanding pemilu legislatif, namun tetap harus ada anggota KPPS tiap TPS. Daryono mengatakan hal itu tidak lantas lebih membebani anggota. Pilkada serentak hanya memilih cabup-cawabup dan cabug cawabup atau hanya dua kotak suara. Ini tidak seperti pemilu legislatif yang memilih calon anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan pemilihan presiden-wakil presiden.

Daryono menerangkan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di masing-masing wilayah saat ini sedang melakukan pemetaan TPS untuk pilkada setelah adanya rakor dengan KPU RI. Pihaknya minta kepada anggota PPS supaya membantu PPK di masing-masing kecamatan untuk melakukan pemetaan TPS. (Lim)-f

## SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA

### Digencarkan di Temanggung



KR-Istimewa

Sosialisasi bahaya narkoba untuk masyarakat dalam TMMD di Temanggung.

**TEMANGGUNG (KR)** - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Temanggung mengencarkan sosialisasi jenis dan bahaya narkoba pada masyarakat di pedesaan. Kepala BNNK Temanggung AKBP Drs Triatmo Hamardiyo MSi mengatakan edukasi kepada masyarakat bertujuan agar mampu bergerak ikut mencegah penyalahgunaan narkoba, yang membahayakan masa depan generasi.

"Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba harus melibatkan semua pihak, tidak bisa hanya BNN, Polri atau pemerintah saja. Masyarakat luas harus bergerak bersinergi," kata Triatmo Hamardiyo, Kamis (30/5), saat sosialisasi di lokasi TMMD di Desa Karangseneng Kecamatan Gemawang.

Dia mengatakan BNNK Temanggung rajin sosialisasi dan edukasi pada masyarakat dengan berbagai segmen seperti pelajar, remaja, PKK dan komunitas. Termasuk di antaranya terlibat dalam program TMMD yang merupakan leading sector TNI dan saat ini berlangsung di Desa Karangseneng. Dalam sosialisasi, juga dihadirkan narasumber Ari Wijanarko, penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda. Menurut AKBP Triatmo, penyalahgunaan narkoba saat ini, termasuk di Temanggung, tidak hanya di perkotaan namun telah sampai di pelosok. Tidak hanya pemakai, bahkan pengedarnya. (Osy)-f

## CIPTAKAN KAMTIBMAS DI JATENG

# Perlu Partisipasi Aktif Masyarakat

**KARANGANYAR (KR)** - Kapolda Jawa Tengah Irijen Pol Ahmad Luthfi menegaskan rasa aman harus diberikan kepada seluruh masyarakat. Dalam menciptakan keamanan, bukan hanya taanggungjawab TNI dan Polri namun juga partisipasi aktif masyarakat.

Demikian disampaikan Kapolda Jateng Ahmad Luthfi kepada jajaran pimpinan forkopimda Kabupaten Karanganyar, kades/lurah, camat dan elemen masyarakat di Safari Kamtibmas yang berlangsung di aula MCC, Rabu (29/5).

Guna menumbuhkan partisipasi itu, komponen masyarakat perlu memahami rasa memiliki atau sense of belonging. Kapolda menyampaikan apresiasi kepada mereka yang berhasil menjaga kamtibmas dan menyukseskan program pemerintah. "Gelaran Pemilu kemarin di

Karanganyar aman terkendali. Tntunya itu bukan hanya peran TNI-Polri dan stake holder lainnya, tetapi berkat masyarakat yang mempunyai sense of belonging, azas gotong royong tepa sliro," ungkap Irijen Pol Ahmad Luthfi.

Kapolda minta tiga pilar menyebarkan pesan perdana terkait Pemilu yang menekankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. "Setelah selesai Pemilu, mari kembali kita rajut persatuan dan kesatuan. Siapapun pilihannya adalah yang terbaik untuk Bangsa Indonesia," tegasnya.

Kapolda menyebut tujuan mengumpulkan tiga pilar untuk merumuskan strategi keamanan wilayah menjelang Pilkada. Operasi Mantap Brata yang hampir selesai akan dilanjutkan dengan Operasi Mantap Praja. Kapolda menekankan pentingnya sinergi tiga pilar dalam mengamankan



KR-Abdul Alim

Kapolda Jateng Irijen Pol Ahmad Luthfi memberikan sambutan dalam apel Tiga Pilar di Karanganyar.

Pilkada 2024. Sebab, pengamanan hanya mengandalkan potensi di daerah. Back up dari Polda maupun Polres tetangga tak akan seperti saat pemilu lalu.

"Sengaja kita kumpulkan Tiga pilar dalam rangka Operasi Mantap Praja. Dalam operasi ini Kapolres dan Dandim tidak bisa minta bantuan perkuatan ke satuan atas atau satuan

samping, karena seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah semua menyelenggarakan pengamanan sendiri sendiri," tandas Irijen Pol Ahmad Luthfi.

Selanjutnya Kapolda mengarahkan tiga pilar di tingkat desa untuk merapatkan barisan dan menciptakan situasi yang aman dan terkendali selama Pilkada. Ia meyakini bah-

wa Tiga Pilar merupakan duta alat pemersatu bangsa yang berperan penting dalam memberikan pengabdian terbaik kepada negara. "Dengan semangat together we can, saya harap sinergi antara Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri dapat menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis di Kabupaten Karanganyar," ungkapnya.

Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi mengatakan para kades, lurah, camat dan forkopimda antusias menghadiri undangan Kapolda. Menurutnya, itu bukti kuatnya kolaborasi dan sinergi menjaga harkamtibmas. Dalam kesempatan tersebut Timotius menyanjung Kapolda melalui pantun, "Bunga mawar bunga melati, bunganya indah harumnya megah, Selamat datang Bapak Irijen Ahmad Luthfi, pemimpin hebat Jawa Tengah." (Lim)-f

# Bupati Klaten Serahkan Bantuan Rehab 245 RTLH

**KLATEN (KR)** - Bupati Klaten, Sri Mulyani secara simbolis menyerahkan bantuan rehab untuk 245 unit rumah tak layak huni (RTLH). Acara berlangsung di Pendapa Kabupaten Klaten, Kamis (30/5) tersebut Bupati didampingi Sekda Klaten Jajang Prihono. Sri Mulyani menyampaikan, setiap penerima bantuan rehab RTLH akan menerima Rp 12 juta untuk setiap unitnya. Jumlah tersebut tersebar di seluruh wilayahcd /jateng-2 Kabupaten Klaten.



KR-Sri Warsiti

Bupati Klaten didampingi Sekda menyerahkan bantuan rehab RTLH secara simbolis.

"Masing-masing bapak atau ibu akan menerima Rp 12 juta yang akan digunakan untuk renovasi rumah yang saat ini kondisinya belum begitu baik. Direnovasi, agar nyaman dan sehat untuk ditinggali," jelasnya.

Lebih lanjut Sri Mulyani menerangkan, nilai bantuan tersebut bukan untuk membangun ulang rumah warga yang tak layak huni. Namun bantuan terse-

but digunakan untuk perbaikan dan renovasi yang didukung dengan gotong royong masyarakat.

"Karena itu, saya minta kepala desa untuk ikut menggerakkan warga masyarakat untuk membantu renovasi RTLH. Agar bantuan yang diberikan oleh Pemkab Klaten cukup dan rumah warga penerima bantuan menjadi lebih nyaman dan sehat untuk ditinggali," tandasnya.

Bupati juga menyampaikan apresiasinya kepada jajaran pemerintah desa yang memberikan respon cepat melaporkan masyarakat yang membutuhkan bantuan rehab RTLH. Ia berharap bantu-

an tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klaten, Jajang Prihono menambah, bantuan yang disalurkan oleh pemerintah daerah bersifat stimulan. Ia menjelaskan dengan demikian program rehab RTLH lebih mengedepankan kemampuan swadaya masyarakat. Kegiatan ini juga didukung kekuatan sosial berupa gotong royong masyarakat.

"Ini yang harus digarisbawahi. Dengan gotong royong, masyarakat dapat menjaga kerukunan sosial dan sebagai modal membangun bangsa," ungkap Sekda. (Sit)-f

## DISETUJUI BUPATI DAN DPRD SUKOHARJO

# Rencana Tata Ruang Wilayah 2024-2044

**SUKOHARJO (KR)** - Bupati Sukoharjo dan DPRD Sukoharjo melakukan persetujuan bersama terhadap substansi rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo tahun 2024-2044. Kegiatan digelar dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sukoharjo, Kamis (30/5).

Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam sambutannya mengytakan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo yang telah bekerja secara maksimal dalam membahas substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044. Sampai akhirnya dapat disepakati Persetujuan Bersama terhadap Substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus), Jaka Wuryanta saat membacakan kesimpulan Pansus DPRD Sukoharjo mengungkapkan, setelah melakukan pembahasan substansi draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tersebut, Pansus merekomendasikan beberapa point penting. Di antaranya pen-

ulisan singkatan IKM agar dihapus dan diubah menjadi Industri Kecil Menengah. Pansus juga merekomendasikan kepada dinas terkait agar lebih konsisten dalam melaksanakan proses meningkatkan pemenuhan RTH di kawasan perkotaan paling sedikit 30 persen dari luar kawasan.

Mengingat keberadaan TPA Mojorejo diperkirakan dalam lima tahun mendatang tidak lagi memadai atau penuh, Pansus merekomendasikan agar perangkat daerah terkait mencari lahan guna pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu di wilayah Kecamatan Bulu. Karena



KR-Wahyu Imam Ibad

Bupati dan Ketua DPRD Sukoharjo melakukan penandatanganan persetujuan bersama Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah 2024-2044.

itu, ada klausul mengenai Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Bulu.

Pansus juga merekomendasikan lahan untuk pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) di

Kecamatan Baki, Kecamatan Grogol, dan Kecamatan Gatak. "Hal itu mengingat pembangunan sekolah di tiga kecamatan tersebut sangat mendesak," tandas Jaka Wuryanta. (Mam)-f

## DYAH HAYUNING PRATIWI

# Terus Perbaiki Pengelolaan APBD

**PURBALINGGA (KR)** - Realisasi belanja pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebesar Rp 2.068.992.338.825 atau 96,40 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan tahun 2023 sebesar Rp 2.146.187.072.000. Realisasi pembiayaan bersih Rp 108.689.020.899, yang berasal dari penerimaan pembiayaan Rp 113.064.503.748. Dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan Rp 4.375.482.849.

Dyah Hayuning Pratiwi menyebutkan, BPK telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 pada 8 Mei 2024. Selanjutnya, Kabupaten Purbalingga kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk yang ke-8 kalinya secara berturut-turut. "Kendati telah mendapat opini WTP delapan kali berturut-turut, perbaikan proses pengelolaan APBD masih perlu terus dilakukan. Hal itu mengingat masih ada



KR-Toto Rusmanto

Dyah Hayuning Pratiwi

beberapa kelemahan dalam proses pengelolaan APBD," jelasnya.

Pada rapat paripurna itu, Bupati Tiwi juga menyerahkan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045. Melalui RPJP tersebut, visi Kabupaten Purbalingga yang ingin diwujudkan dalam Periode 2025-2045 adalah, Purbalingga Mandiri Maju dan

Berkelanjutan, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia.

Dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyerahan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Rabu (29/5) lalu, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) mengungkapkan, pendapatan yang melampaui target itu sebagian besar berasal dari pelampauan pendapatan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) dan pendapatan pajak daerah. Realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp 2.066.978.403.884 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi Rp 341.097.401.340, pendapatan transfer terealisasi Rp 1.715.757.338.360, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 10.123.664.184,00.

Disebutkan, realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga tahun 2023 sebesar Rp 2.066.978.403.884,77.

Angka tersebut setara 101,40 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp 2.038.485.069.000. Sementara itu realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp 2.068.992.338.825,92 atau 96,40 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan tahun 2023 sebesar Rp 2.146.187.072.000.

"Selisih minus Rp 2.013.934.941 itu ditutup Pembiayaan Netto Rp 108.689.020.899, sehingga terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Rp 106.675.085.957. Silpa Rp 106.675.085.957 itu terbagi menjadi Silpa terikat Rp 79.674.111.044 (74,69 persen) yang telah ditetapkan peruntukannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Sisanya Silpa bebas yang hanya sebesar Rp 27.000.974.913,00 atau 25,31 persen seluruhnya dialokasikan penggunaannya dalam APBD murni TA-2024," kata Bupati Purbalingga, (Toto Rusmanto)-f